

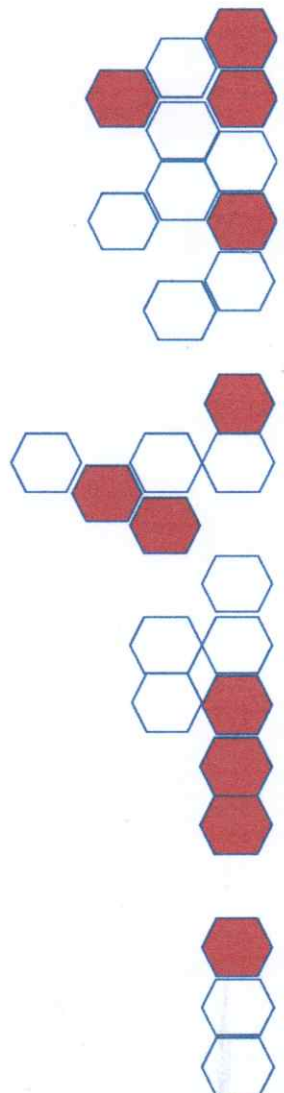
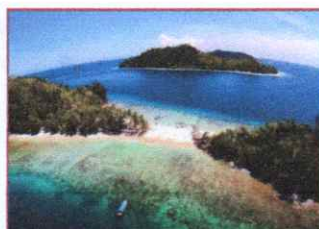
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

**TAHUN 2022**



## **Laporan Monitoring dan Evaluasi**

### **Standar Operasional Prosedur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ijin dan rahmat-nya Laporan Review SOP ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam mendukung pembangunan Pelayanan Publik, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya demi terselenggaranya good government. Laporan Review SOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataa Ruang Kabupaten Pesisir Selatan ini cukup penting dan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai percepatan waktu pelayanan serta efisiensi dan efektivitas SOP yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan review SOP seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang review waktu pelayanan publik yang ada.

Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan baik peneliti, fungsional lain dan personil manajerial maka tugas dapat terlaksana lebih baik lagi dan tepat sasaran sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan stakeholder.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya dan kritiknya yang membangun terhadap kinerja pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipit sehingga laporan ini dapat disusun.

Painan, 02 Februari 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Devitra Syamsunardini, ST.MM  
NIP. 19720101 199701 1 001

## DAFTAR ISI

|                    |   |
|--------------------|---|
| KATA PENGANTAR     |   |
| DAFTAR ISI         | 1 |
| BAB I PENDAHULUAN  | 2 |
| 1.1 Latar Belakang | 4 |
| 1.2 Tujuan         | 6 |
| BAB II PEMBAHASAN  | 7 |
| BAB III PENUTUP    | 8 |
| 3.1 Kesimpulan     |   |
| 3.2 Saran          | 8 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi dan good governance (pemerintah yang baik) diperlukan system pemerintah yang efektif dan efisien dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur negara sehingga diharapkan dapat memberikan dampak pada penurunan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelaksanaan anggaran yang lebih baik, program-program pembangunan ,masyarakat meningkat, kualitas pengelolaan lebijakan dan pelayanan publik meningkat. Sehingga perlu untuk menetapkan peta proses bisnis dan SOP (Standar Operasional Prosedur) sebagai acuan untuk pelayanan publik. Dalam rangka porfesionalitas Pelayanan Publik untuk dan mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan menjamin kelancaran, serta transparansi penyelesaian suatu jenis kegiatan pelayanan internal dan eksternal unit organisasi di lingkunagn Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menyusun standar operasional prosedur dan Standar Pelayanan.

Pengertian SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas yang dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. SOP merupakan standar yang dijadikan acuan dalam proses penyelesaian setiap judul kegiatan dalam organisasi. Oleh Karena itu, penyusunan dan penetapan SOP merupakan suatu keharusan dan perlu dilakukan evaluasi minimal satu tahun sekali untuk perbaikan.

Pelaksanaan Review SOP harus dilakukan secara terus menerus dipantau sehingga proses penerapannya dapat berjalan dengan baik. Masukan-masukan dalam setia upaya review SOP akan menjadi bahan yang berharga dalam percepatan da evaluasi sehingga penyempurnaan-penyempurnaan terhadap SOP dapat dilakukan secara cepat sesuai dengan maksud dna tujuan yang tercantum dalam Standar Pelayanan Publik, mengidentifikasi permasalahan yang mungkn timbul, dan menentukan cara untuk meningkatkan hasil penerapan atau menyediakan dukungan tambahan.

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik harus berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam memberikan pelayanan sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

**VISI:**

**“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”**

**MISI :**

1. Sejahtera : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
2. Maju : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan.
3. Bermartabat : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Barsandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah).
4. Akuntabel : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban
5. Profesional : Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme)

Untuk itu, sebagai instansi penyelenggara pelayanan publik diperlukan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dengan melakukan review SOP secara berkala.

## 1.2 Tujuan

Tujuan dilakukan Review SOP adalah:

- 1) Melakukan perbaikan layanan publik kepada pengguna;
- 2) Mempercepat pelayanan publik kepada pengguna;
- 3) Memudahkan pengguna dalam mengakses pelayanan publik yang ada;
- 4) Menghasilkan inovasi baru untuk kepuasan pelayanan kepada pengguna;
- 5) Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas;
- 6) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab;
- 7) Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- 8) Menciptakan ukuran standar kinerja untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan.
- 9) Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah dapat berlangsung dalam berbagai situasi;
- 10) Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mut, waktu dan prosedur;
- 11) Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayan.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan review secara berkala untuk seluruh Pelayanan Publik yang terkait dengan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

Dari hasil SOP untuk 2021 ini, tidak ada perubahan yang terjadi terhadap SOP yang telah ada, dan telah dijalankan dengan baik.

## BAB III

### PENUTUP

#### 3.1 Kesimpulan

Review SOP diharapkan dapat menghasilkan efisiensi dan efektivitas dalam hal pelayanan publik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan. Diantaranya dengan mempersingkat waktu layanan dan mempersingkat birokrasi pelayanan kepada masyarakat sehingga pengguna menjadi lebih memahami perbedaan jangka waktu penyelesaian pelayanan dan jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan

Pembagian prosedur layanan bagi pengguna yang berbeda akan membantu pelaksanaan layanan seta pengguna juga akan lebih memahami persyaratan dan prosedur apa yang harus dipenuhi untuk menggunakan layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

Dari hasil review SOP ini diharapkan agar pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi lebih efisien dan efektif sehingga mempermudah pengguna dalam memanfaatkan layanan yang ada di Dins Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

#### 3.2 Saran

1. Review SOP untuk pelayanan publik dilingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilakukan secara berkala setahun sekali untuk mengevaluasi jalannya kegiatan pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan publik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan
2. Perlu dilakukan sosialisasi secara tatap muka dengan seluruh pejabat atau pegawai yang ada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar SOP yang telah ditetapkan dapat diketahui dan diterapkan oleh seluruh pegawai karena sejauh ini sosialisasi baru sebatas publikasi pada media social.

Demikianlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SOP di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan ini disampaikan sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi pimpinan dan penyempurnaan SOP, sehingga SOP bias diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari secara

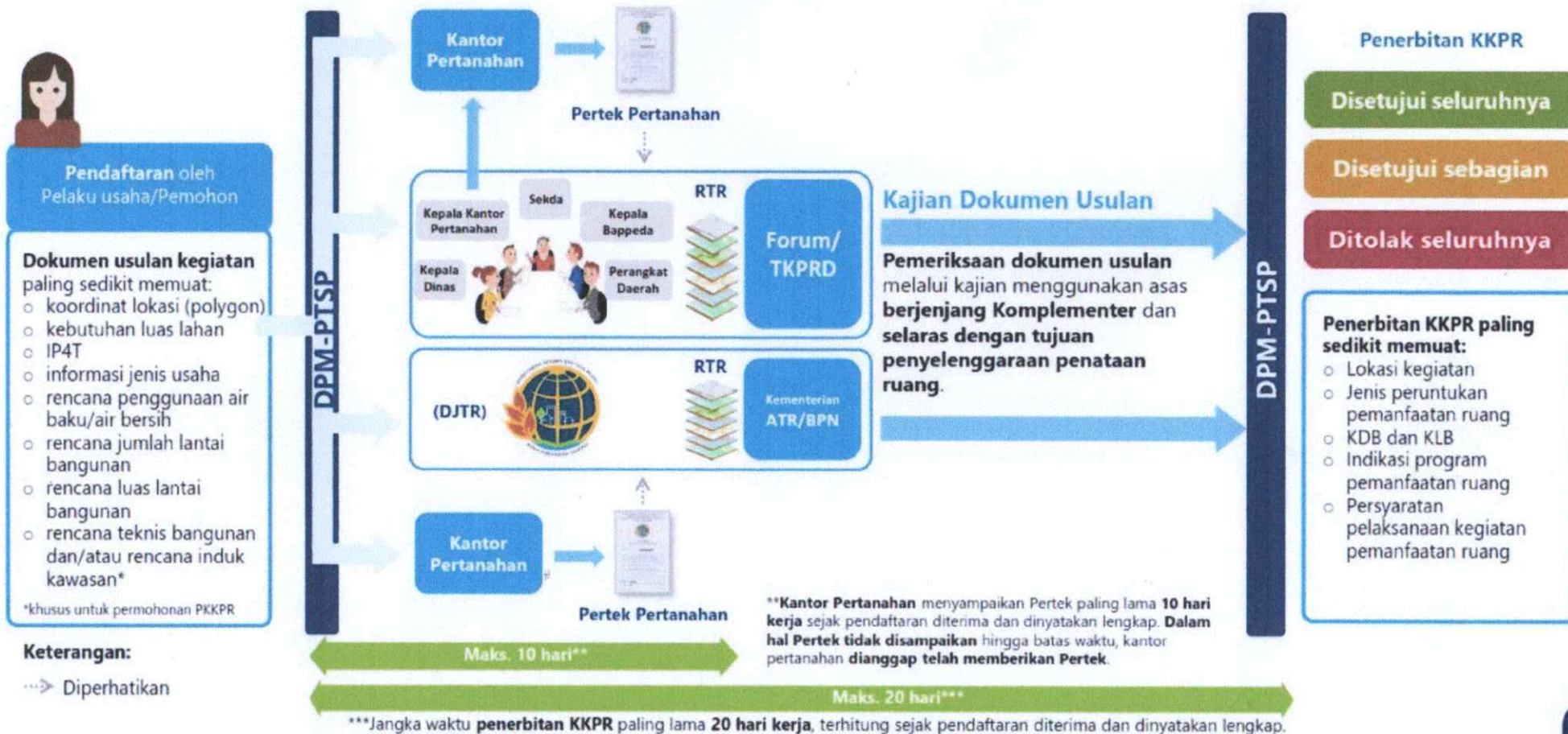
maksimal sebagai panduan praktis dan efisiensi yang bermuara pada peningkatan kinerja organisasi,

Painan, 02 Februari 2022  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Devitra Syamsunardini, ST.MM  
NIP. 19720101 199701 1 001

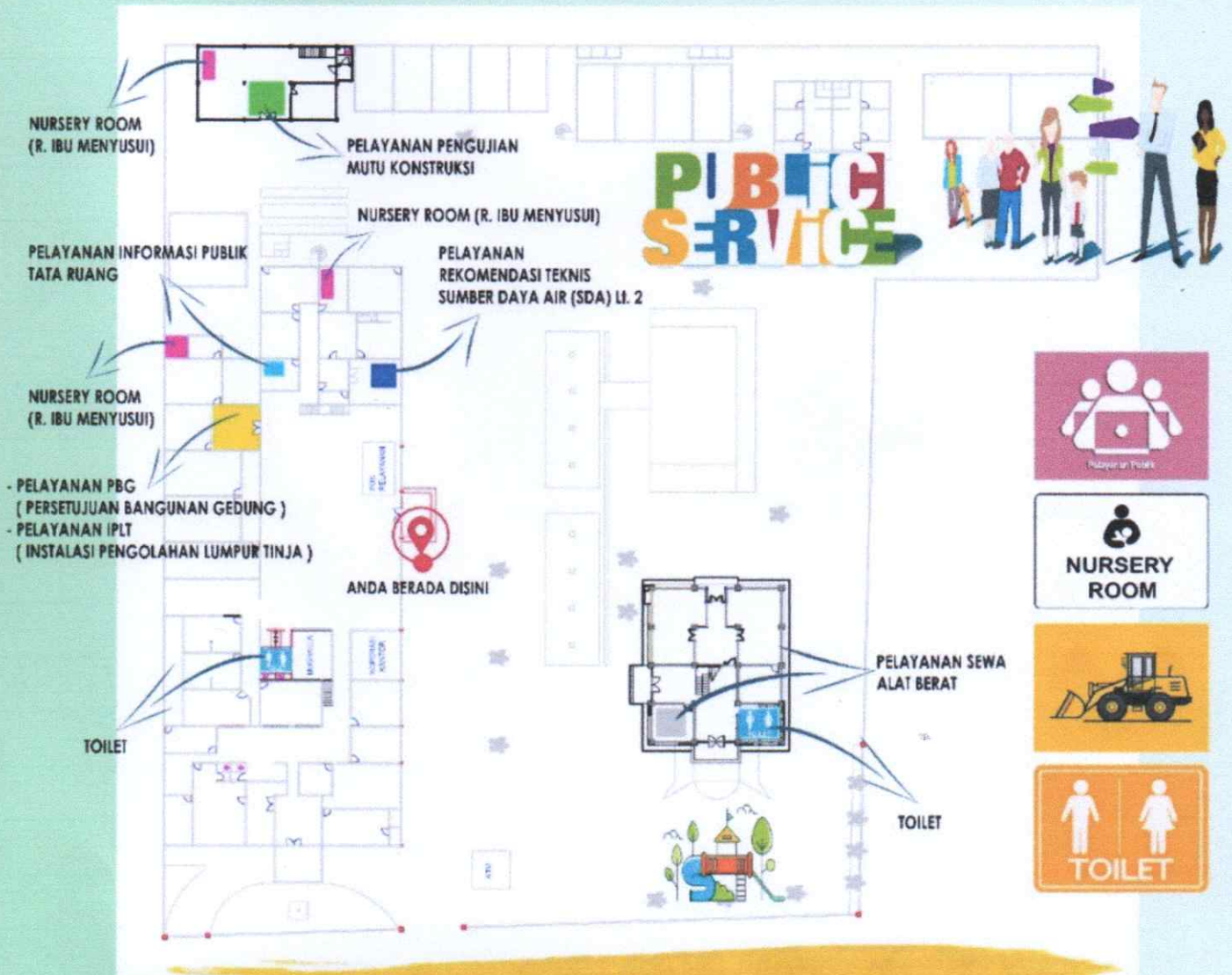
## Proses Bisnis Pelaksanaan KKPR secara Non-elektronik dalam Masa Transisi



# PELAYANAN PUBLIK

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

" SSTP (Santun, Sigap dan Tepat dalam Pelayanan) "



## MAKLUMAT PELAYANAN

"Dengan ini, kami sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku"